

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
DINAS KETAHANAN PANGAN



KOTA TASIKMALAYA  
TAHUN 2018

## KATA PENGANTAR



Berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah Allah SWT, maka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya Tahun 2018 (LAKIP DKP 2018) dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. LAKIP DKP 2018 ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas kinerja dan keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya dalam merealisasikan tujuan dan sasaran strategis yang telah disepakati dan ditetapkan dalam dokumen Renja DKP 2018, yang merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2018. LAKIP ini juga menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan dari sumber anggaran APBD Kota Tasikmalaya, yang memiliki kaitan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas serta berdampak nyata terhadap pencapaian target indikator kinerja utama (IKU). LAKIP ini juga menguraikan secara detail keselarasan antara pencapaian sasaran Renstra SKPD 2017 - 2022 dan sasaran Rencana Kinerja Tahunan 2018 dengan sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya 2017 - 2022 dan indikator kinerja utama RPJMD 2017 - 2022.

Penyusunan LAKIP DKP 2018 merupakan implementasi atas amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun tata cara penyusunannya, berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP DKP 2018 ini tersusun berkat kerjasama, bantuan, dukungan serta masukan dari banyak pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat,

khususnya kepada Tim Penyusun LAKIP DKP 2018 yang telah berupaya bekerja keras dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas diamanahkan sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan dengan sebaikmungkin. Kami menyadari LAKIP ini masih mengandung sisi kelemahan dan kekurangan sehingga dengan hati terbuka dan ikhlas, kami senantiasa menyambut baik atas segala bentuk kritik positif serta saran konstruktif dari semua pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan LAKIP pada masa mendatang.

Akhir kata, semoga LAKIP DKP 2018 ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun sebagai bahan evaluasi kerja. Disamping itu, semoga LAKIP ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah SWT. Amin Ya Robbal'Alamin.

Tasikmalaya, Februari 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA TASIKMALAYA

Ir. H. ABU MANSYUR, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196307121994021002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2018 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan dan kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah yang berdiri pada awal tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya, yakni Dinas Ketahanan Pangan yang menangani Urusan Ketahanan Pangan pada tahun 2017 berdiri sendiri. Selanjutnya penyusunan LAKIP tahun 2018 ini dibuat berdasarkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 yang disesuaikan menurut tugas pokok fungsi dan kewenangan Dinas Ketahanan Pangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Untuk Urusan Ketahanan Pangan, terdapat 11 Indikator Kunci Utama (IKU) yang ditetapkan pada tahun 2018, yaitu : Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita, Persentase Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan, Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan, Persentase Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Ideal, Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan, Kategori IKM, Nilai Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah, Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah, dan Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP. Berdasarkan kondisi tersebut maka khusus untuk indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan haruslah mendapatkan prioritas agar pada akhir rencana strategis target dapat terpenuhi. Adapun realisasi anggaran belanja langsung yang dipergunakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja untuk Urusan Ketahanan sebesar Rp 3.665.019.800,- dan terrealisasi sebesar Rp. 3.524.067.780,- (96,15%).

Beberapa permasalahan yang masih dijumpai tahun 2018 untuk Urusan Ketahanan Pangan terutama adalah pola konsumsi pangan Kota Tasikmalaya, antara lain:

1. Masih tingginya konsumsi padi-padian terutama beras dan rendahnya konsumsi umbi-umbian, serta sayur dan buah;
2. Pemanfaatan sumber-sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sayuran pun masih rendah;
3. Masih diperlukan upaya untuk penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat menuju skor PPH yang ideal agar hidup sehat, aktif, dan produktif.

Untuk mendukung peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan dan untuk mengantisipasi kondisi terjadinya daerah rawan pangan, upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya pada tahun 2018 yaitu:

1. Pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah tingkat kota sebesar 9,6 Ton;
2. Percepatan pengembangan lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 lumbung pangan masyarakat di 7 gapoktan;
3. Penguatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) di 7 Gapoktan;
4. Penyusunan Neraca Bahan Makanan dari sisi Ketersediaan;
5. Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Non Beras non Terigu;
6. Terlaksananya pembangunan Kawasan Rumah Pangan Lestari di 30 Kelompok Ketahanan Pangan (KKP);
7. Pembinaan Konsumsi dan Kemanan Pangan;
8. Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gerakan Gemar Makan Sayuran dan Umbi-umbian;
9. Sosialisasi keamanan pangan bagi anak sekolah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Gambaran Umum .....	1
B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi .....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	8
Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017 .....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018 .....	11
BAB IV PENUTUP .....	14
A. Kesimpulan .....	14
B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut .....	14
LAMPIRAN .....	15

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Gambaran Umum**

Pangan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat disubstitusi dengan bahan lain. Isu strategis di Kota Tasikmalaya diantaranya :

1. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah.
2. Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Kota Tasikmalaya (skor PPH 73)
3. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras (110 Kg/kapita/tahun)
4. Lemahnya akses pangan masyarakat
5. Fluktuasi Harga
6. Tingginya prosentase penduduk rawan pangan
7. Lemahnya koordinasi lintas sector
8. Masih ditemukannya kasus ketidakamanan pangan.

Ketahanan pangan, di samping sebagai prasyarat untuk memenuhi hak azasi manusia, juga merupakan pilar utama bagi eksistensi dan kedaulatan suatu bangsa. Oleh sebab itu, seluruh komponen bangsa baik Pemerintah, Masyarakat dan Pihak Swasta, mulai dari Pusat, Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sepakat untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan Nasional maupun Daerah. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan desentralistis saat ini, pelaku utama pembangunan pangan mulai dari produksi, penyediaan, distribusi dan konsumsi adalah masyarakat, sedangkan pemerintah lebih berperan sebagai inisiator, fasilitator, serta regulator, agar kegiatan masyarakat yang memanfaatkan sumber daya daerah dapat berjalan lancar, efisien, berkeadilan dan bertanggungjawab.

Pemerintah Kota Tasikmalaya sebagai bagian integral dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif, dalam berbagai hal untuk melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama mengatasi masalah kekurangan pangan dan kelaparan, kekurangan gizi serta kemiskinan di dunia. Kesepakatan tersebut antara lain tertuang dalam Deklarasi Roma Tahun 1996 pada KTT Pangan Dunia (World Food Summit 1996) dan ditegaskan kembali dalam World Food Summit: five years later (WFS:fyI) 2001, serta deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 2000 yang isinya antara lain menyepakati mengurangi angka kemiskinan ekstrem/penduduk lapar dan kerawanan pangan di dunia sampai setengahnya.

Seiring dengan amanat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Bagian Kesatu Pasal 59 bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat, Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya selaku lembaga teknis yang menangani urusan ketahanan pangan harus mampu menjawab isu-isu ketahanan pangan seperti di atas.

## **B. Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi**

Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Ketahanan Pangan Kota Tasikmalaya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan, perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

### **A. Kepala Dinas**

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja dinas.
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;

- b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas.
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Lembaga Pangan.

3) Rincian Tugas Kepala Dinas :

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja dinas;
- b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja dinas untuk mendukung visi dan misi daerah;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang pangan;
- d. menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi dinas;
- f. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah atau unit kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Sekretariat**

Koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a) penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
  - b) penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
  - c) penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

Rincian Tugas Sekretariat :

- a) menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
- b) mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Dinas;
- c) mengelola administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah serta kerumahtanggaan dinas;
- d) menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan dinas;
- e) mengoordinasikan penyiapan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang pangan;
- f) menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang pangan;
- g) mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
- h) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
- i) melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan**

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Ketersediaan dan distribusi Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang ketersediaan, cadangan pangan dan penanggulangan kerawanan pangan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi bidang ketersediaan, cadangan pangan dan kerawanan pangan.

- Rincian Tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan :
  - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
  - c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
  - d. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan kegiatan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan;
  - e. menyelenggarakan pengkajian pengembangan program ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program ketersediaan dan distribusi pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
  - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan dalam bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

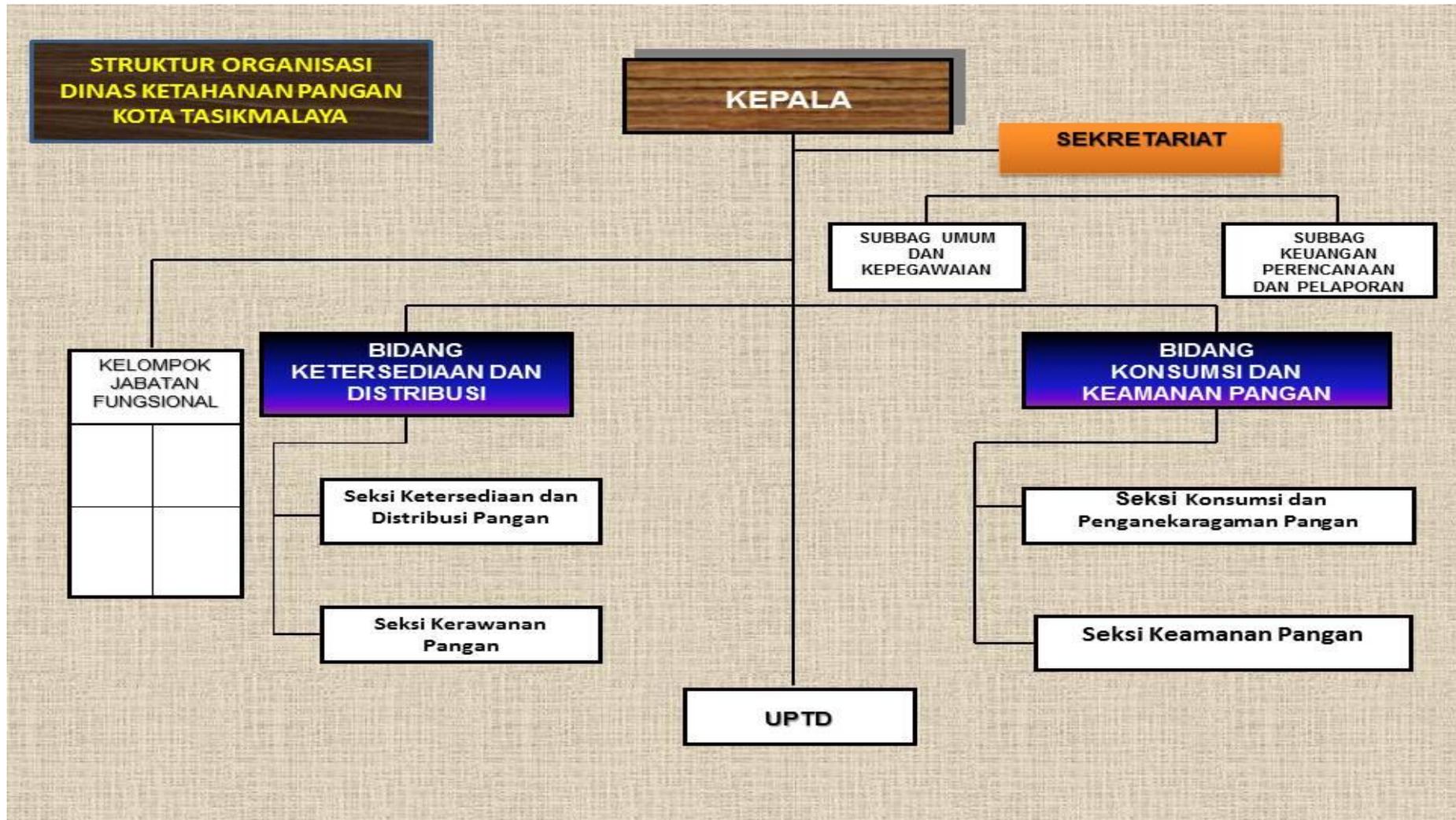
- a. penyelenggaraan perencanaan program peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;

c. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan konsumsi dan keamanan pangan;

➤ Rincian Tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

- a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dalam bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan konsumsi dan keamanan pangan;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan program bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. menyelenggarakan pengkajian pengembangan program konsumsi dan keamanan pangan;
- f. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program konsumsi dan keamanan pangan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### C. STRUKTUR ORGANISASI



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2017

Penyusunan LAKIP tahun 2017 berdasarkan Renstra 2017 - 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. Untuk komponen Perjanjian Kinerja (PK) Urusan Ketahanan Pangan yang akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan meliputi :

No.	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Sumber Data
	Sasaran RPJMD yang diacu	Sasaran Renstra SKPD		
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah Maturitas SPIP Perangkat Daerah Persentase Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Barang Sesuai SAP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DPA/DPPA</li> <li>- Renstra</li> <li>- Analisis Statistik Ketahanan Pangan</li> <li>- Data Kepegawaian</li> <li>- Laporan Keuangan</li> <li>- Laporan Capaian Kinerja</li> <li>- Indikator Kinerja Utama</li> <li>- Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan</li> </ul>
2.	Menguatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkeadilan	Meningkatnya Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan	Persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita Persentase Penganekaragaman Konsumsi Pangan Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Persentase Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Ideal Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-undang nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pangan;</li> <li>- Laporan Harga Pangan;</li> <li>- Angka Kecukupan Gizi rata-rata perkapita per hari;</li> <li>- Perpres No. 22 Tahun 2009 tentang Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal;</li> <li>- Permentan No. 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal;</li> </ul>

Selanjutnya sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan tersebut pada tahun 2018 dijabarkan dalam program / kegiatan:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - a) Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
  - b) Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat;
  - c) Penguatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat;
  - d) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dari sisi Ketersediaan;
  - e) Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Non Beras dan Terigu;
  - f) Peningkatan Asupan Gizi Makanan Tambahan Bagi Masyarakat Rawan Pangan;
  - g) Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dari Sisi Ketersediaan;
  - h) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Cibeureum;
  - i) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Cihideung;
  - j) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Cipedes;
  - k) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Indihiang;
  - l) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Kawalu;
  - m) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Mangkubumi;
  - n) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Purbaratu;
  - o) Optimalisasi Pemnafaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Tamansari;
  - p) Pembinaan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
  - q) Penguatan Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Tasikmalaya;
  - r) Revitalisasi Cipta Menu dengan Pola Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman Berbasis Kearifan Lokal;

s) Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gerakan Gemar Makan Sayuran dan Umbi-umbian.

2. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

a) Sosialisasi Keamanan Pangan Bagi Anak Sekolah.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja aparatur diukur dengan membandingkan antara penetapan indicator kinerja dan capaian indicator kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang teknis pelaksanaan sasaran tersebut diturunkan dalam Renstra Dinas.

### A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2018

#### - Target Capaian dan Realisasi Capaian Kinerja Dinas

Dalam Perjanjian Kinerja DKP 2018, terdapat 9 indikator kinerja untuk Urusan Ketahanan Pangan, dengan kelompok sasaran program/kegiatan : keluarga miskin, rumah tangga miskin, kelompok ketahanan pangan, kelompok pertanian, Penggerak PKK, dan pengrajin/pengolahan pangan lokal.

program prioritas pembangunan	INDIKATOR PROGAM (OUTCOME)				SATUAN	KINERJA		
	INDIKASI KEGIATAN (OUTPUT)					Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	8	9	10
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	<b>Indikasi output kegiatan subbidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan</b>						
		1	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah		%	86	86,11	100%
		2	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan		%	78	33,07	40%
		<b>Indikasi output kegiatan subbidang Kerawanan Pangan</b>						
		1	Penanganan Daerah Rawan Pangan		%	47	6,25	30%
		<b>Indikasi output kegiatan subbidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</b>						
		1	Pemenuhan Angka Kecukupan Gizi Ideal		%	68	98,5	100%
		<b>Indikasi output kegiatan subbidang Keamanan Pangan</b>						

	1	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	76	80	100%
		<b>Indikasi output kegiatan Subag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan</b>				
	1	Penyusunan laporan kinerja keuangan dan neraca aset	%	1	1	100%
	2	Perencanaan, evaluasi dan pelaporan	%	4	4	100%
	3	Penguatan Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Tasikmalaya	%	1	1	100%
		<b>Indikasi output kegiatan Subag Umum dan kepegawaian</b>				
	1	Pelaporan aset sarana dan prasarana kantor	%	2	2	100%
	2	Pengadaan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	100%
	3	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor	%	100	100	100%
	4	Penyediaan barang dan jasa perkantoran	%	100	100	100%
	5	Peningkatan kapasitas aparatur	%	100	100	100%
	6	Penyediaan jasa prasarana aparatur	%	100	100	100%
	6	Rapat Koordinasi kedalam dan keluar daerah	%	100	100	100%
	7	Penyediaan Makanan dan Minuman	%	100	100	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Pagu Indikatif	Realisasi Anggaran
1				2	3	4	5
<b>Belanja Renja</b>							
5				Belanja Langsung			
5	2			Belanja Langsung Non Urusan			
5	2	15		Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
5	2	15	26	Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya penambahan cadangan pangan pemerintah daerah kota tasikmalaya dan verifikasi data daerah terdampak rawan pangan	150.000.000	142.122.250
5	2	15	27	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Terlaksananya rapat koordinasi tingkat kota, monitoring kelompok dan pelatihan aparatur pengurus lumbung pangan masyarakat.	30.000.000	29.229.900
5	2	15	29	Penguatan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM)	Terlaksananya Rapat Koordinasi LUPM tingkat Kota, Monitoring Terhadap LUPM dan TTI yang sudah berdiri dan Pelatihan (leadership, Pengembangan Kewirausahaan, Pembukuan) Aparatur Pengurus LUPM dan TTI.	100.000.000	96.511.550
5	2	15	35	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) dari sisi ketersediaan	Terlaksananya Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) Kota Tasikmalaya.	50.000.000	49.282.050
5	2	15	43	Lomba Cipta Menu Berbasis Pangan Non Beras dan Terigu	Terlaksananya Lomba Cipta Menu Tingkat Kota Tasikmalaya dan terlaksananya keikutsertaan Kota Tasikmalaya pada lomba cipta menu tingkat Provinsi	90.000.000	88.888.196
5	2	15	68	Peningkatan Asupan Gizi Makanan Tambahan Bagi Masyarakat Rawan Pangan	Tersedianya Bahan Makanan tambahan bagi Keluarga Rawan Pangan/miskin	140.000.000	137.866.900
5	2	15	69	Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) dari sisi Ketersediaan	Terlaksananya penyusunan dokumen penghitungan pola pangan harapan (PPH) dari sisi ketersediaan Kota Tasikmalaya	45.000.000	44.732.900
5	2	15	71	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Cibeureum	Terlaksananya fasilitas pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah kecamatan cibeureum	200.000.000	182.486.100
5	2	15	72	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Cihideung	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah kecamatan cihideung	60.000.000	57.426.975
5	2	15	73	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Cipedes	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah kecamatan cipedes	120.000.000	113.062.500

5	2	15	74	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Indihiang	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah kecamatan indihiang	50.000.000	47.816.800
5	2	15	75	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Kawalu	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah kecamatan Kawalu	250.000.000	238.683.040
5	2	15	76	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Mangkubumi	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Mangkubumi	250.000.000	245.707.300
5	2	15	77	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Purbaratu	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Purbaratu	56.500.000	53.670.800
5	2	15	78	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dengan Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari di Wilayah Kecamatan Tamansari	Terlaksananya fasilitasi pelatihan dan penyediaan sarana ketahanan pangan bagi kader ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Tamansari	200.000.000	180.905.700
5	2	15	79	Pembinaan Konsumsi dan Keamanan Pangan	Terlaksananya pembinaan konsumsi dan keamaan pangan	36.500.000	36.177.150
5	2	15	80	Penguatan Lembaga Dewan Ketahanan Pangan Tingkat Kota Tasikmalaya	Terlaksananya rapat koordinasi dewan ketahanan pangan Kota Tasikmalaya dan rapat kelompok kerja (Pokja) dewan ketahanan pangan Kota Tasikmalaya	100.000.000	96.497.795
5	2	15	83	Revitalisasi Cipta Menu dengan Pola pangan Beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis Kearifan Lokal	Terlaksananya Revitalisasi Cipta Menu dengan Pola pangan Beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis Kearifan Lokal	100.000.000	99.295.760
5	2	15	81	Sosialisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gerakan Gemar Makan Sayuran dan Umbi-umbian	Terlaksananya sosialisasi penganekaragaman konsumsi pangan dan gerakan gemar makan sayuran dan umbi-umbian	50.000.000	49.551.700
5	2	31		<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>			
5	2	31	06	Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Anak Sekolah	Terlaksananya sosialisasi keamanan pangan bagi anak sekolah dan pengawasan pangan segar	81.000.000	77.201.450

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Secara umum indikator kinerja utama untuk Urusan Ketahanan Pangan sudah sesuai dengan Renstra, namun demikian beberapa perubahan, penambahan dan penajaman terhadap indikator kinerja tersebut perlu dilakukan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Ketahanan Pangan. Adapun capaian indikator kinerja secara umum telah memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018, kecuali persentase penanganan daerah rawan pangan dan persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan faktor external yang tidak dapat dipenuhi akan tetapi untuk persentase Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita melebihi target yang telah ditetapkan sehingga ketersediaan akan pangan di Kota Tasikmalaya dalam keadaan aman. Adapun efisiansi kinerja untuk urusan tersebut dievaluasi efisien.

### **B. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut**

Untuk Urusan Ketahanan Pangan, masalah utama yang dihadapi pada tahun 2018 adalah Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang masih belum mencapai kondisi ideal.

Perlunya komitmen yang diiringi dengan langkah nyata pemerintah daerah untuk meningkatkan Ketahanan Pangan serta pemanfaatan hasil analisis ketahanan pangan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan ketahanan pangan merupakan kunci upaya yang perlu ditindaklanjuti untuk membangun/meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya yang berkelanjutan.

# LAMPIRAN